

**PENGARUH PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP  
PENCEGAHAN FRAUD PENGADAAN BARANG DAN IMPLIKASINYA  
PADA KINERJA KEUANGAN  
( Studi pada Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Kota Bandung )**

**Eka Ariaty Arfah**  
STIE Wira Bhakti Makassar

**Abstract**

*The aim of this study is to analysis the effect of internal control applying on good levying fraud prevention and its implication to the financial performance. Survey the sum of 105 responder covering hospital directors, financial director, accounting/finance chief, staff of general section, financial section and supply section on the public and private hospital in Bandung city. Data have been collected by questioner and hospital financial reports. The tools of statistic analysis using multiple regression.*

*The result of this study indicates that there is positive effect of internal control applying on good levying fraud prevention and its implication to the financial performance. Its means that financial performance influenced by internal control applying on good levying fraud prevention and influenced residue by other factors are not included in this study model.*

**Keyword:** *Internal control, applying on goods levying fraud prevention, financial performance*

**PENDAHULUAN**

Rumah sakit merupakan salah satu jaringan pelayanan kesehatan yang penting, sarat dengan tugas, beban, masalah dan harapan yang digantungkan kepadanya. Perkembangan jumlah rumah sakit di Indonesia, diikuti pula dengan perkembangan pola penyakit, perkembangan teknologi kedokteran dan kesehatan serta perkembangan harapan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit dan tenaga ahli yang berkualitas dalam bidang kesehatan.

Sebagai entitas pelayanan umum, rumah sakit tetap dituntut untuk tetap *survive* dan memperlihatkan kinerjanya dengan baik, walaupun kondisi krisis global memberikan dampak pada hampir seluruh lini sektor perekonomian, termasuk rumah sakit. Kinerja rumah sakit dapat dilihat dari segi keuangan dan non keuangan. Namun, menurut Ahmad (2000:21) indikator yang sering digunakan dalam melakukan penilaian kinerja suatu perusahaan adalah dengan menggunakan pendekatan keuangan dimana informasinya di lihat dari laporan keuangan atau sumber keuangan lainnya.

Kinerja rumah sakit, terutama kinerja keuangan merupakan hal yang penting karena digunakan untuk mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan rumah sakit terutama bagi pihak manajemen dan pemodal (untuk rumah sakit swasta). Hasil analisis dapat digunakan untuk melihat kelemahan keuangan rumah sakit dan mengukur tingkat efisiensi selama periode waktu berjalan. Kelemahan yang terdapat dirumah sakit dapat segera diperbaiki, sedangkan hasil yang cukup baik harus dipertahankan pada waktu mendatang.

Pengelolaan rumah sakit yang baik tentunya akan memberikan acuan atau-pun gambaran bagaimana rumah sakit terkelola secara transparan, adanya kemandirian,

akuntabel, adanya pertanggungjawaban dan kewajaran sehingga kinerja keuangan pada rumah sakit dapat dicapai sesuai dengan visi dan misi rumah sakit yang telah ditentukan sebelumnya. Namun demikian harapan diatas belum sepenuhnya dapat dirasakan. Hal ini disebabkan karena belum memadainya instrumen organisasi untuk menciptakan pengelolaan yang baik dan belum terbangunnya komitmen yang tinggi dari para pengelola rumah sakit. Akibatnya muncul berbagai penyimpangan, penyelewengan, penyeludupan dan korupsi. Fenomena *fraud* menjadi sesuatu yang lumrah di rumah sakit.

Intensitas pembicaraan mengenai *fraud* di rumah sakit semakin tinggi, sama halnya yang terjadi di sektor publik lainnya, utamanya sektor pemerintah yang menangani masalah pelayanan umum pada masyarakat. Sebenarnya, niat pemerintah mulai terlihat dan memperhatikan program untuk mengeliminasi *fraud* yang dilakukan oleh aparat pemerintahan. Hal ini diindikasikan dengan peningkatan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); kejaksaan, kepolisian, atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Namun sayangnya, hal ini seperti-nya belum menjadi semacam komitmen untuk dijalankan secara bersama secara konsisten di semua lini.

Tingginya intensitas praktik kecurangan, penipuan, dan penggelapan yang terjadi pada suatu institusi publik maupun privat, dengan segala modusnya, dari yang sederhana sampai yang sangat canggih dan rumit, seharusnya menyadarkan semua pihak untuk membangun komitmen terhadap penerapan tata kelola yang baik secara konsisten dan meluas pada semua lapisan karena tanpa adanya kesadaran dan komitmen akan mengakibatkan tidak tercapainya kinerja keuangan yang baik pada rumah sakit.

Kajian ICW tentang korupsi kesehatan dari 51 kasus korupsi kesehatan yang diusut sampai tahun 2008 dan menimbulkan kerugian negara mencapai 128 milyar hanya mampu menyeret regulator ditingkat lokal Kadinkes dan DPRD serta Direktur Rumah Sakit. Sedangkan korupsi ditingkat *middle upper* nol. Selain itu, kasus korupsi yang terungkap masih berputar dalam pengadaan barang dan jasa dengan modus markup sebanyak 22 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp.103 Milyar. Hanya sebagian kecil korupsi dengan modus penyuaipan terungkap. Padahal modus penyuaipan merupakan modus paling banyak dan potensial terjadi terutama korupsi ditingkat *middle upper* yang mungkin melibatkan pejabat Depkes, DPR, BPOM dan Badan pengawas kesehatan lainnya.

Hasil kajian ICW lainnya menunjukkan bahwa kesempatan merupakan faktor dominan dan pemicu korupsi kesehatan diantara dua faktor utama seperti rasionalisasi tindakan korupsi dan tekanan diluar individu. Lebih dalam lagi, faktor kesempatan menguat karena besarnya diskresi atau kewenangan pejabat, rendahnya transparansi, dan akuntabilitas serta penegakan hukum disektor kesehatan. Selain itu, suara warga yang minim juga telah meningkatkan kesempatan korupsi disektor kesehatan ini.

Melihat kenyataan tersebut, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam menanggulangi korupsi dengan menggunakan alur pikir memerangi korupsi yang jelas. Hal pertama yang harus diidentifikasi adalah penyebab utama kejadian korupsi sehingga bisa dirumuskan strategi yang tepat untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi intensitas yang ditimbulkan dari penyebab tersebut. Dari berbagai seminar anti korupsi yang pernah diselenggarakan BPKP, maka secara garis besar penyebab kejadian korupsi dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu aspek institusi, aspek manusia dan aspek sosial budaya.

Untuk menangani *fraud* pengadaan barang pada rumah sakit, diperlukan upaya yang sistematis dan terintegrasi dalam strategi investigatif dan strategi preventif. Strategi investigatif memang akan terlihat berhasil dalam memberantas korupsi, namun dalam jangka panjang strategi ini akan mendorong kondisi yang kontra produktif dalam kegiatan pembangunan. Hal ini perlu diatasi dengan mengedepankan

strategi preventif. Untuk melaksanakan strategi tersebut, maka sistem pengendalian intern harus diterapkan secara efektif.

Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan *fraud* sangat besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan *fraud* dapat diperkecil. Walaupun kesalahan dan *fraud* masih terjadi, bisa diketahui dengan cepat dan dapat segera diambil tindakan-tindakan perbaikan sedini mungkin.

Komponen pengendalian internal antara lain: lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian risiko (*risk assessment*), aktivitas pengendalian (*control activity*), komunikasi dan informasi (*information and Communication*), dan pemantauan (*monitoring*) (Intosai, 2004). Komponen pengendalian internal antara satu dengan lainnya saling berhubungan dan timbul dari proses manajemen. Pengendalian internal bukanlah suatu kejadian tunggal, tetapi merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan yang meliputi operasi organisasi. Tindakan-tindakan ini melekat dalam metode yang digunakan manajemen untuk melaksanakan operasi sehari-hari. Apabila salah satu komponen tidak dilaksanakan dengan memadai, maka seluruh pengendalian intern tidak akan berjalan efektif (Ruslan, 2009).

Dengan dibangun dan diimplementasikannya pengendalian internal, diharapkan akan menimbulkan daya tangkal terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh para pelayanan publik, khususnya dibidang kesehatan seperti dokter dan tenaga paramedis lainnya.

## KAJIAN TEORI

### **Teori Entitas dan Teori Agensi**

Entity Theory Paton (1922) menjelaskan bahwa manajemen perusahaan (direksi) terpisah dari pemilik. Ada kesepakatan antara pemilik dan manajemen untuk mengelola dan mengendalikan harta perusahaan dalam upaya untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik (pemegang saham).

Teori agensi atau juga biasa disebut *contracting theory*, menjelaskan adanya hubungan antara agen dan *principal*. Yang dimaksud dengan *principal* adalah pemegang saham dan yang dimaksud dengan agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Untuk itu, maka manajer yang diangkat oleh pemegang saham harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham, tetapi ternyata sering terdapat konflik antara manajemen dan pemegang saham. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Karena seringnya terjadi konflik, maka masalah-masalah tersebut sering disebut dengan masalah keagenan.

Jensen dan Mecling (1976), menyatakan permasalahan keagenan (*agency problems*) pertama kali timbul ketika adanya pemisahan fungsi kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dimana pemilik perusahaan (*principal*) memberikan tugas dan tanggungjawab pengelolaan perusahaan kepada para agen dimana para agen tersebut bertugas sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh pemilik perusahaan sedangkan manajer sendiri memiliki kepentingan (insentif dan bonus) atas pengelolaan perusahaan yang telah dilakukannya.

### **Konsep Pengendalian Internal**

Pengertian pengendalian internal telah mengalami perubahan baik dalam konsep maupun komponen-komponennya sesuai dengan perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks. Pada awal perkembangannya pengendalian internal diartikan sebagai internal cek. Internal cek dengan konsep kesamaan hasil melalui pencocokan catatan dari dua bagian atau lebih. Sebagaimana diungkapkan *American*

*Institute of Certified Public Accountant (AICPA)* yang dikutip Moller & Witt (1999;81) menjabarkan definisi pengendalian internal sebagai berikut:

*"Internal control comprises the plan of organization and all of the coordinate methods and measures adopted within a business to safeguard its assets, check the accuracy and reliability of its accounting data, promote operational efficiency, and encourage adherence to prescribed managerial policies"*

Pengendalian internal yang terdapat dalam perusahaan tidak hanya mencakup kegiatan akuntansi dan keuangan saja tetapi meliputi segala aspek kegiatan perusahaan. Pengendalian internal dapat digunakan untuk: 1) Menjaga keamanan harta milik perusahaan; 2) Memberikan keyakinan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada pimpinan adalah benar; 3) Meningkatkan efisiensi usaha; dan 4) Memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan telah dijalankan dengan baik. Dengan pengendalian internal yang baik, terjadinya *fraud* dan pemborosan dapat dideteksi dan ditang-gulangi secara dini sehingga kerugian perusahaan dapat dihindari.

Selanjutnya pengertian pengendalian internal mengalami perluasan, tahun 1958 AICPA memperkenalkan perbedaan antara *accounting control* dan *administrative control*. Kemudian tahun 1972 dilakukan perubahan nama menjadi *internal control system*. Dengan *internal control system* ini, bukan hanya dihasilkan pengendalian akuntansi tetapi juga pengendalian administrasi, yang dikembangkan melalui penetapan struktur organisasi, uraian tugas, pemberian wewenang, prosedur, seleksi sumber daya manusia, situasi kerja yang sehat, dan pengawasan langsung.

Selanjutnya tahun 1988, AICPA dengan SAS No. 55 dengan judul *"Considerations of the internal control structure in a financial statement audit"* mengubah Sistem Pengendalian Internal menjadi Struktur Pengendalian Internal. Perkembangan selanjutnya tahun 1992 *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* dari *Treadway Commission* menerbitkan suatu laporan yang berjudul *Internal Control-Integrated Framework*. Di dalam COSO terdapat wakil-wakil dari AICPA, *American Accounting Association*, *Institute of Internal Auditors*, *Institute of Management Accountants*, dan *Financial Executive Institute*. Laporrannya terdiri dari empat volume : (1) *Executive Summary*; (2) *Framework*; (3) *Evaluations Tools*; and (4) *Reporting to Externals Parties*.

Laporan COSO (1992; 9-12) juga menekankan bahwa konsep fundamental (*fundamental concept*) dinyatakan dalam definisi berikut :

- a) *Internal control is process. It is a means to an end, not an end itself. It consists of a series of actions that are pervasive and integrated with, not added onto, an entity's infrastructure.*
- b) *Internal control is effected by people. It is not merely a policy manual and forms, but people at every level of an organization, including the board of directors, management, and other personel.*
- c) *Internal control can be expected to provide only reasonable assurance, not absolute assurance, to an entity's management and board because of limitations inherent in an internal control systems and the need to consider the relative costs and benefits of establishing controls.*
- d) *Internal control is geared to the achievement of objectives in the overlapping categories of financial reporting, compliance, and operations.*

Konsep fundamental terakhir secara implisit merupakan asumsi bahwa manajemen dan dewan direksi pada kenyataannya memformulasikan dan secara periodik memperbaharui tujuan entitas dalam setiap tiga kategori. Untuk menyediakan berhubungan dengan tujuan entitas, diidentifikasi komponen-komponen pengendalian internal yang saling berhubungan.

Pengertian yang lebih luas mengenai pengendalian internal dikemukakan oleh Konrath (2002:205), mengutip *AICPA Profesional Standards*, mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut :

"The process effected by an entity's board of directors, management, and other personnel designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: (a) operations control-relating to the effective and efficient use of the entity's resource; (b) financial reporting controls-relating to the preparation of reliable published financial statements; and (c) compliance controls-relating to the entity's compliance with applicable laws and regulations. "

Boynton (2001:326) menyatakan: "Control the safeguarding of assets against unauthorized acquisition, use, and disposition", yang dapat diartikan bahwa pengendalian internal merupakan usaha perlindungan terhadap aset dengan menentang pengambilalihan, penggunaan, dan disposisi aset secara tidak sah.

Pengendalian internal mencakup lima komponen dasar kebijakan prosedur yang dirancang manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan tertentu perusahaan dapat dipenuhi. Arens (2004; 273) mengemukakan bahwa:

"Internal control includes five categories of controls that management design and implements to provide reasonable assurance that management's control objectives will be met. These are the component of internal control and are:

- (1) Control Environment,
- (2) Risk Assessment,
- (3) Information and Communication,
- (4) Control Activities,
- (5) Monitoring.

### **Konsep Pencegahan Fraud Pengadaan Barang**

Menurut Tuanakotta (2006:159) ada ungkapan yang secara mudah ingin menjelaskan penyebab atau akar permasalahan dari *fraud*. Ungkapan itu adalah : *fraud by need, by greed and by opportunity*. Ungkapan tersebut diartikan jika kita ingin mencegah *fraud*, hilangkan atau tekan sekecil mungkin penyebabnya.

Banyak organisasi tidak memiliki upaya untuk menghadapi *fraud* dengan pendekatan proaktif. Ketika *fraud* terjadi dalam suatu organisasi harus menghadapi suatu dilema. Apabila terjadi dugaan *fraud*, umumnya banyak organisasi menyelesaikannya secara internal tanpa mau dipublikasikan. Selanjutnya kasus ditutup dan masalahnya dianggap selesai.

Menurut Hall (2001), *fraud* menunjuk pada penyajian fakta yang bersifat material secara salah yang dilakukan oleh satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk membohongi dan mempengaruhi pihak lain untuk bergantung pada fakta tersebut, fakta yang akan merugikan dan berdasarkan hukum yang berlaku, suatu tindakan yang curang (*fraudulent act*) harus memenuhi lima kondisi ini :

1. Penyajian yang salah. Harus terdapat laporan yang salah atau tidak diungkapkan.
2. Fakta yang sifatnya material. Suatu fakta harus merupakan faktor yang substansial yang mendorong seseorang untuk bertindak.
3. Tujuan. Harus terdapat tujuan untuk menipu atau pengetahuan bahwa laporan tersebut salah.
4. Ketergantungan yang dapat dijustifikasi. Penyajian yang salah harus merupakan faktor yang substansial yang menyebabkan pihak lain merugi karena ketergantungannya.
5. Perbuatan tidak adil atau kerugian. Kebohongan tersebut telah menyebabkan ketidakadilan atau kerugian bagi korban *fraud*.

*Fraud* terjadi pada dua tingkatan, yaitu ***fraud pegawai*** dan ***fraud manajemen***. Adalah penting untuk membedakan antara kedua jenis *fraud* ini karena tiap jenis memiliki tanggung jawab dan implikasi yang berbeda bagi auditor.

1. ***Fraud pegawai atau fraud oleh pegawai non-manajemen***, biasanya ditujukan untuk langsung mengkonversi kas atau aktiva lainnya untuk keuntungan pegawai tersebut. Pada umumnya, pegawai tersebut mengakali perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Jika suatu perusahaan memiliki sistem pengendalian

internal yang efektif, kebangkrutan atau penggelapan uang dapat di-deteksi atau dihindari. *Fraud* pegawai biasanya melibatkan tiga langkah: (1) mencuri sesuatu yang berharga (sebuah aktiva), (2) mengkonversi aktiva tersebut ke bentuk yang dapat digunakan (kas), dan (3) menutupi kejahatannya agar tidak diketahui. Langkah ketiga sering kali merupakan hal yang paling sulit. Langkah ini mungkin relatif mudah bagi petugas administrasi gudang untuk mencuri persediaan dari gudang perusahaan, tetapi mengubah catatan persediaan lebih menantang.

2. ***Fraud manajemen*** lebih tersembunyi dan membahayakan daripada *fraud* pegawai dan seringkali lolos dari deteksi sampai organisasi tersebut menderita kerugian atau kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. *Treadway Commission* tentang Pelaporan Kecurangan Keuangan mengamati bahwa pada tingkat makro, manajemen dapat terlibat dalam kegiatan kecurangan untuk mendapatkan harga saham yang lebih tinggi atau penawaran utang atau hanya untuk memenuhi harapan para investor sedangkan pada tingkat mikro biasanya dapat melibatkan data keuangan yang dilaporkan secara salah dan melaporkannya untuk mendapatkan kompensasi tambahan, untuk mendapatkan promosi, atau untuk melarikan diri dari hukuman karena kinerja yang buruk. *Fraud* manajemen biasanya terdiri atas tiga karakter ini :

1. *Fraud* ini dilakukan pada tingkat manajemen di atas tingkat manajemen di mana struktur kontrol internal biasanya berkaitan.
2. *Fraud* ini biasanya melibatkan penggunaan laporan keuangan untuk menciptakan ilusi bahwa entitas lebih sehat dan lebih makmur dari kenyataannya.
3. Jika *fraud* tersebut melibatkan pernyataan aktiva secara salah, ia biasanya dikelilingi oleh transaksi bisnis yang kompleks, yang sering kali melibatkan pihak ketiga.

Karakteristik sebelumnya dari *fraud* manajemen menunjukkan bahwa pihak manajemen sering kali melakukan hal yang melanggar peraturan dengan mengesampingkan sistem pengendalian internal yang efektif. Ketika pihak manajemen menggunakan laporan keuangan tersebut untuk menciptakan ilusi, data yang diinput biasanya dimanipulasi dengan memasukkan transaksi yang salah atau dapat dipertanyakan atau penilaian yang dapat dipertanyakan berkaitan dengan alokasi biaya atau pengakuan pendapatan.

Dengan memahami jenis-jenis *fraud* maka akan dilakukan teknik dan metode pencegahannya. Tujuan utama pencegahan *fraud* adalah untuk menghilangkan sebab-sebab munculnya *fraud*. Menurut Amrizal (2004:3) *fraud* sering terjadi apabila :

- 1) Pengendalian internal tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar atau tidak efektif.
- 2) Pegawai diperkerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka.
- 3) Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan.
- 4) Model manajemen melakukan *fraud*, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat pada hukum dan peraturan yang berlaku.
- 5) Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang harus dipecahkan, masalah keuangan, masalah kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan.
- 6) Industri di mana perusahaan menjadi bagiannya memiliki sejarah atau tradisi terjadinya *fraud*.

Pencegahan *fraud* pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain dalam perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi yaitu : Efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (COSO;1992:13).

Menurut Tuanakotta (2006:162) pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal. Pengendalian internal yang aktif biasanya merupakan bentuk pengendalian internal yang paling banyak diterapkan. Ia seperti pagar-pagar yang menghalangi pencuri masuk ke halaman rumah orang. Seperti pagar, bagaimanapun kokohnya tetap dapat ditembus oleh pelaku *fraud* yang cerdik dan mempunyai nyali untuk melakukannya.

Menurut Pope (2007), pencegahan *fraud* dalam hal pengadaan barang publik, antara lain :

### **1. Memperkuat Kerangka Hukum**

Alat yang paling ampuh adalah menyingkapkannya kepada publik. Media dapat memainkan peran penting untuk menciptakan kesadaran publik mengenai masalah ini dan untuk membangun dukungan bagi langkah-langkah yang perlu diambil. Jika masyarakat diberi informasi rinci mengenai keburukan dan pelanggaran hukum dalam korupsi - siapa yang terlibat, berapa suap yang diterima, berapa kerugian yang timbul dan jika masyarakat terus mendapat informasi seperti ini secara teratur, sulit dibayangkan masyarakat tidak akan menuntut diadakan pembaruan.

Di Indonesia, ada suatu acuan tindakan disebut dengan tindak pidana korupsi adalah UU No. 31/1999 yang telah di ubah dengan UU No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan yang selama ini menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah Kepres No. 80 tahun 2003, perlu dikaitkan dengan UU No. 31/1999 untuk dapat efektif menghalangi tindak pidana korupsi

Persyaratan hukum berikutnya adalah kerangka yang baik dan konsisten prinsip-prinsip dan praktik-praktik dasar pengadaan barang publik. Kerangka ini bentuknya dapat bermacam-macam, tetapi ada kesadaran yang makin tinggi mengenai manfaat memiliki Peraturan Pengadaan Barang yang seragam, yang menetapkan dengan jelas prinsip-prinsip dasar, dan dilengkapi dengan peraturan yang lebih rinci untuk setiap lembaga pelaksana.

### **2. Prosedur transparan**

Selain dari kerangka hukum, pertahanan berikutnya melawan *fraud* adalah prosedur dan praktik yang terbuka dan transparan untuk melaksanakan proses pengadaan barang itu sendiri. Belum ada orang yang menemukan cara yang lebih baik untuk melawan *fraud* dalam pengadaan barang daripada prosedur seleksi pemasok atau kontraktor berdasarkan persaingan yang sehat.

Apakah sebuah prosedur rumit atau sederhana tergantung pada nilai dan spesifikasi barang yang akan dibeli, tetapi unsur-unsurnya sama bagi semua prosedur:

- Menguraikan dengan jelas dan tanpa memihak apa yang akan dibeli;
- Mengumumkan kesempatan untuk menawarkan barang;
- Menyusun kriteria untuk mengambil keputusan pada waktu seleksi;
- Menerima penawaran dari pemasok yang bertanggung jawab.
- Membandingkan penawaran dan menentukan penawaran yang terbaik, menurut peraturan yang telah ditetapkan lebih dahulu bagi seleksi; dan
- Memberikan kontrak pada penawar yang menang seleksi tanpa mengharuskannya menurunkan harga atau mengadakan perubahan lainnya pada penawarannya yang menang itu.

### **3. Membuka dokumen tender**

Satu kunci untuk mewujudkan transparansi dan sikap tidak memihak adalah pembeli membuka dokumen tender pada waktu dan di tempat yang telah ditetapkan, di hadapan semua pengikut tender atau wakil-wakil mereka yang ingin hadir. Praktik membuka dokumen tender di depan umum, sehingga setiap orang dapat melihat siapa yang mengajukan penawaran dan dengan harga berapa, dapat mengurangi

risiko bahwa tender yang bersifat rahasia itu dibocorkan kepada peserta lain, diabaikan, diubah atau dimanipulasi.

Beberapa pemerintah menolak membuka dokumen tender di depan publik, dengan alasan hasil yang sama dapat diperoleh dengan membuka dokumen tender di depan komisi resmi pemerintah tanpa dihadiri para penawar. Keputusan pemenang yang dihasilkan dengan cara ini jelas akan dicurigai masyarakat, terutama karena sudah jadi rahasia umum bahwa pembeli ikut melakukan korupsi.

#### **4. Evaluasi penawaran**

Evaluasi penawaran adalah langkah yang paling sulit dalam proses pengadaan barang untuk dilaksanakan secara benar dan adil. Bersamaan dengan itu langkah ini adalah salah satu langkah yang paling mudah dimanipulasi jika ada pejabat yang ingin mengarahkan keputusan pemenang pada pemasok tertentu.

Para penilai dapat menolak penawaran-penawaran yang tidak diinginkan dengan alasan yang dicari-cari, biasanya menyangkut pelanggaran prosedur – ada bekas dihapus, sebuah halaman tidak diparaf - atau dengan alasan penyimpangan dari spesifikasi, yang menuntut mereka cukup besar. Setelah penawaran diperiksa, jika tidak ada yang menghalangi, para penilai mungkin menetapkan syarat-syarat yang sama sekali baru yang harus diperhitungkan ketika memilih pemenang atau kriteria evaluasi mungkin dibuat demikian subjektif tanpa ukuran-ukuran objektif sehingga penilaian dapat menelurkan hasil yang diinginkan para penilai.

#### **5. Melimpahkan wewenang**

Prinsip peninjauan ulang dan audit independen sudah diterima luas sebagai cara untuk menyingkapkan kesalahan atau manipulasi dan memperbaikinya. Prinsip ini menduduki tempat yang penting dalam bidang pengadaan barang publik. Sayangnya, prinsip ini juga digunakan oleh beberapa orang untuk mencipta-kan celah untuk melakukan kompsi. Khususnya, pelimpahan wewenang untuk menyetujui kontrak merupakan bidang yang patut dibahas.

Sepintas lalu, alasan untuk melimpahkan wewenang cukup meyakinkan: pejabat lebih rendah berwenang menilai dan menyetujui pembelian kecil-kecil, sedangkan pejabat lebih tinggi berwenang meninjau-ulang penilaian oleh bawahan dan menyetujui kontrak-kontrak besar. Semakin besar nilai kontrak, semakin tinggi pangkat pejabat yang berwenang mengambil keputusan untuk menyetujui-nya atau tidak. Pembelian sebuah meja dapat diputuskan oleh pegawai bagian urusan pembelian; pembelian sebuah komputer harus mendapat persetujuan direktur; pembangunan sebuah jalan harus disetujui oleh Menteri; dan pem-bangunan sebuah bendungan mungkin harus disetujui oleh Presiden.

#### **6. Pemeriksaan dan audit independen**

Tinjauan-ulang dan audit independen memainkan peran yang sangat penting. Namun di beberapa negara, tinjauan ulang dan tahap-tahap persetujuan demikian banyak sehingga seluruh proses pengadaan barang publik boleh dikatakan lumpuh. Di beberapa negara, dalam hal kontrak besar, diperlukan waktu lebih dari dua tahun paling tidak, untuk menentukan pemenang, dari sejak penawaran diajukan.

### **Konsep Kinerja Keuangan**

Penerapan sistem akuntansi umum (*accrual basis*) dalam pengelolaan keuangan rumah sakit sudah lazim dilakukan terutama rumah sakit swasta. Tujuan diterapkannya sistem ini untuk peningkatan efisiensi pelayanan rumah sakit melalui sistem pencatatan dan pelaporan keuangan dengan pencatatan ganda (*double entry*).

Menurut Johar (2006:229), penilaian efisiensi dilakukan dengan meman-faatkan laporan keuangan dari suatu sistem akuntansi. Kajian atau analisis terhadap laporan keuangan dikenal dengan sebutan analisa rasio. Rasio keuangan rumah sakit digunakan untuk mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan rumah sakit terutama bagi pihak manajemen dan pemodal (untuk rumah sakit swasta). Hasil analisis dapat digunakan untuk melihat kelemahan finansial rumah sakit dan

mengukur tingkat efisiensi selama periode waktu berjalan. Kelemahan yang terdapat di rumah sakit dapat segera diperbaiki, sedangkan hasil yang cukup baik harus dipertahankan pada waktu mendatang. Selanjutnya analisis historis tersebut dapat digunakan untuk penyusunan rencana dan kebijakan di masa mendatang.

Analisis finansial atas laporan rumah sakit pada dasarnya menggunakan berbagai macam rasio yang tidak berbeda seperti pada perusahaan yang berorientasi profit. Rasio tersebut meliputi likuiditas (*liquidity ratios*), struktur modal (*capital structure ratios*), aktivitas dan rasio profitabilitas (*profitability ratios*). Sebagai bahan pembandingan rasio yang dimiliki oleh suatu rumah sakit dengan rumah sakit sejenis digunakan angka baku (seperti rasio industri).

Beberapa rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan rumah sakit, yaitu (Johar, 2006:230-238) : 1) Rasio Likuiditas, 2) Rasio Struktur Modal (*Capital Structure Ratio*), 3) Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*) 4) Rasio Profitabilitas. Berkenaan dengan pengadaan barang di rumah sakit, rasio keuangan yang cocok untuk di analisa dalam penelitian ini adalah rasio aktivitas.

### Hipotesis Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat pengaruh positif pada penerapan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan baik secara parsial maupun simultan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang.
2. Terdapat pengaruh positif pada penerapan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja keuangan.
3. Terdapat pengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengadaan barang terhadap kinerja keuangan.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatory untuk mendapatkan kejelasan fenomena yang terjadi secara empiris (*real word*) dan berusaha untuk mendapatkan jawaban (*verificative*) hubungan kausalitas antar variabel melalui pengujian hipotesis (Singarimbun dan Effendi, 1995), yakni penelitian ini hanya berlaku pada rumah sakit pemerintah dan swasta di Kota Bandung). Periode waktu yang digunakan adalah *cross section* (Sekaran, 2003).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan sebagai variabel  $X_1$ , variabel  $X_2$ , variabel  $X_3$ , variabel  $X_4$  dan variabel  $X_5$
2. Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Kinerja Keuangan sebagai variabel  $Y$  dan  $Z$ .

Variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian ini terkait dengan sikap, pendapat dan persepsi maka tipe skala yang digunakan adalah **skala Likert**. Untuk setiap pertanyaan atau pernyataan dari setiap variabel diberi nilai skor dari yang terendah hingga tertinggi secara berturut-turut diberikan nilai 1, 2, 3, 4, 5

Unit analisis dalam penelitian ini rumah sakit pemerintah dan swasta di kota Bandung. Responden dalam penelitian ini adalah direktur rumah sakit, direktur keuangan, kepala bagian keuangan/akuntansi dan pegawai pada rumah sakit pemerintah dan swasta di kota Bandung.

Responden dalam penelitian ini sebanyak 138 orang yang ada pada rumah sakit pemerintah dan swasta di kota Bandung. Data kuesioner tersebar ke 138 responden, kuesioner yang dikembalikan dan dapat diolah berjumlah 105 eksemplar.

Untuk menguji pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dan implikasinya pada kinerja keuangan adalah menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) karena alat analisis tersebut dapat digunakan sebagai model prediksi terhadap satu variabel dependen dari beberapa variabel independen (Gul dkk, 1995) dan juga menggunakan metode analisis regresi linear (*linear regression analysis*) karena digunakan sebagai model prediksi terhadap satu variabel dependen dari satu variabel independen, sehingga terdapat 3 model persamaannya sebagai berikut :

1. Untuk menguji hipotesis pertama dalam penelitian ini digunakan bentuk umum persamaan regresi linier berganda, yaitu:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Dimana:

Y = pencegahan *fraud* pengadaan barang

$\beta_0$  = nilai konstan, merupakan nilai terikat dalam hal ini adalah Y pada saat variabel independennya adalah 0 ( $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 = 0$ ).

$\beta_1$  = koefisien regresi linier berganda antar variabel independen  $X_1$  terhadap variabel dependen Y, bila variabel  $X_2, X_3, X_4$ , dan  $X_5$  dianggap konstan.

$\beta_2$  = koefisien regresi linier berganda antar variabel independen  $X_2$  terhadap variabel dependen Y, bila variabel  $X_1, X_3, X_4$ , dan  $X_5$  dianggap konstan.

$\beta_3$  = koefisien regresi linier berganda antar variabel independen  $X_3$  terhadap variabel dependen Y, bila variabel  $X_1, X_2, X_4$ , dan  $X_5$  dianggap konstan.

$\beta_4$  = koefisien regresi linier berganda antar variabel independen  $X_4$  terhadap variabel dependen Y, bila variabel  $X_1, X_2, X_3$ , dan  $X_5$  dianggap konstan.

$\beta_5$  = koefisien regresi linier berganda antar variabel independen  $X_5$  terhadap variabel dependen Y, bila variabel  $X_1, X_2, X_3$ , dan  $X_4$  dianggap konstan.

$X_1$  = lingkungan pengendalian

$X_2$  = penilaian risiko

$X_3$  = kegiatan pengendalian

$X_4$  = informasi dan komunikasi

$X_5$  = pemantauan

$\varepsilon$  = *Residual Value* atau variabel lain diluar variabel yang diteliti

2. Untuk menguji hipotesis kedua dalam penelitian ini digunakan bentuk umum persamaan regresi linier berganda, yaitu:

$$Z = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Dimana:

Z = kinerja keuangan

$\beta_0$  = nilai konstan, merupakan nilai terikat dalam hal ini adalah Y pada saat variabel independennya adalah 0 ( $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 = 0$ ).

$\beta_1$  = koefisien regresi linier berganda antar variabel independen  $X_1$  terhadap variabel dependen Y, bila variabel  $X_2, X_3, X_4$ , dan  $X_5$  dianggap konstan.

$\beta_2$  = koefisien regresi linier berganda antar variabel independen  $X_2$  terhadap variabel dependen Y, bila variabel  $X_1, X_3, X_4$ , dan  $X_5$  dianggap konstan.

$\beta_3$  = koefisien regresi linier berganda antar variabel independen  $X_3$  terhadap variabel dependen Y, bila variabel  $X_1, X_2, X_4$ , dan  $X_5$  dianggap konstan.

$\beta_4$  = koefisien regresi linier berganda antar variabel independen  $X_4$  terhadap variabel dependen Y, bila variabel  $X_1, X_2, X_3$ , dan  $X_5$  dianggap konstan.

$\beta_5$  = koefisien regresi linier berganda antar variabel independen  $X_5$  terhadap variabel dependen Y, bila variabel  $X_1, X_2, X_3$ , dan  $X_4$  dianggap konstan.

$X_1$  = lingkungan pengendalian

$X_2$  = penilaian risiko

$X_3$  = kegiatan pengendalian

$X_4$  = informasi dan komunikasi

$X_5$  = pemantauan

$\varepsilon$  = *Residual Value* atau variabel lain diluar variabel yang diteliti

3. Untuk menguji hipotesis kedua dalam penelitian ini digunakan bentuk umum persamaan regresi linier, yaitu:

$$\text{Fungsi} : Y = a + b_1x_1 + \varepsilon$$

$$\text{Koefisien} : b = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \quad \text{Sumber: Sugiyono (2001:171)}$$

$$\text{Intercept} : a = \frac{(\sum x)(\sum x) - (\sum x)(\sum xy)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \quad \text{Sumber: Sugiyono (2001:171)}$$

Dengan menggunakan analisis *multiple regression (software SPSS 15 for windows)* dilakukan pengolahan data yang dihasilkan. Koefisien regresi menunjukkan pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan implikasinya pada kinerja keuangan. Berdasarkan hasil pengolahan data maka dibentuk satu persamaan regresi untuk masing-masing hipotesis penelitian:

1. Persamaan regresi berganda untuk hipotesis pertama yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = 0,125 + 0,270 X_1 + 0,167X_2 + 0,030 X_3 + 0,206 X_4 + 0,294 X_5$$

2. Persamaan regresi berganda untuk hipotesis kedua yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = -3,701 + 0,576 X_1 + 0,881X_2 + 0,025 X_3 + 0,087 X_4 + 0,096 X_5$$

3. Persamaan regresi berganda untuk hipotesis ketiga yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Z = -2,635 + 1,275 Y$$

### Pengujian Kualitas Data

#### Uji Validitas Data

Teknik korelasi yang digunakan dalam melakukan uji validasi adalah korelasi *Rank Spearman (r)*. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan suatu instrumen dianggap valid atau layak digunakan dalam pengujian hipotesis apabila koefisien korelasi lebih besar atau sama dengan 0,30 (Barker, 2002). Dengan menggunakan fasilitas *software aplikasi SPSS 15 for windows* maka hasil dari pengujian validitas terhadap instrumen pertanyaan untuk variabel independen dan dependen dalam penelitian ini memiliki lebih besar dari pada 0,30, sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan adalah valid.

#### Pengujian Reliabilitas.

Uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode teknik belah dua dari *Spearman-Brown*. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan suatu instrumen dikatakan reliabel jika memberikan nilai lebih besar daripada 0,70 (Barker, 2002).

Hasil dari pengujian reliabilitas data untuk variabel independen dan dependen dalam penelitian ini menunjukkan bahwa angka-angka pada seluruh variabel dalam penelitian ini, semuanya menunjukkan besaran di atas nilai 0,70. Hal ini berarti bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel independen dan dependen adalah reliabel.

### Pengujian Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa variabel lingkungan pengendalian ( $X_1$ ), penilaian risiko ( $X_2$ ), kegiatan pengendalian ( $X_3$ ), informasi dan

komunikasi ( $X_4$ ) dan pemantauan ( $X_5$ ) serta pencegahan *fraud* pengadaan barang ( $Y$ ) memiliki pola data berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Ada tidaknya terjadi multikolinearitas pada model regresi yang dapat dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factors*). Nilai VIF yang kecil menunjukkan tidak adanya korelasi yang tinggi (sempurna) antar variabel bebas dalam model regresi. Batasan nilai untuk variabel dikatakan berkolinieritas tinggi jika diperoleh nilai VIF untuk variabel bebas lebih besar dari 10. Hasil perhitungan nilai VIF untuk variabel bebas dalam model regresi pada penelitian ini menunjukkan angka yang lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi kolinieritas yang tinggi antara variabel bebas dalam persamaan regresi yang diperoleh.

### Uji Heterokedastisitas

Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan pendekatan uji-Glesjer. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa residual (error) yang muncul dalam persamaan regresi untuk variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$ ,  $X_5$  dan  $Y$  mempunyai varians yang sama (*homoskedastisitas*) karena hasil pengujian untuk variabel tersebut dengan harga mutlak dari residual (error) tidak signifikan yang ditunjukkan oleh p-value (sig) lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Dari hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa semua variabel telah memenuhi syarat asumsi klasik, sehingga pengujian regresi dapat dilanjutkan.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh penerapan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang**

#### Uji Simultan

Untuk menguji hipotesis pertama mengenai pengaruh pada penerapan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel tidak bebas (pencegahan *fraud* pengadaan barang) dilihat dari nilai determinasi yang diperoleh. Hasil perhitungan koefisien determinasi dalam analisis regresi yang dilakukan diperoleh lebih dari 0 yaitu sebesar **0,742**. Koefisien determinasi yang diperoleh memperlihatkan adanya pengaruh positif pada penerapan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dalam menjelaskan pencegahan *fraud* pengadaan barang sebesar **74,2%**. Sedangkan sisanya 25,8% yang dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya saja variabel yang berkaitan dengan kualitas informasi akuntansi, internal audit, *intellectual capital* atau faktor internal organisasi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Tuanakotta (2006), bahwa upaya mencegah *fraud* dimulai dari pengendalian intern. Demikian pula dengan Hurley (2007), untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan pada perusahaan dan meminimalkan auditor eksternal untuk melegalkan bukti-bukti yang palsu pada laporan keuangan, pengimplementasian dari pengendalian intern setidaknya dapat mengurangi kolusi manajemen mengenai *fraud*.

Temuan penelitian juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusnardi (2008) bahwa variabel *internal kontrol* memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada BUMN terbuka di Indonesia dan penelitian yang dilakukan oleh Singleton (2002) bahwa kebijakan bisnis dan hukum yang berlaku pada perusahaan membutuhkan manajemen yang menekankan pada keefektifan

pengendalian internal dan kekuatan pada lingkungan pengendalian untuk melindungi aset perusahaan sehingga dapat mencegah terjadinya *fraud*.

#### **Uji Parsial**

#### **Pengaruh penerapan lingkungan pengendalian terhadap pencegahan fraud pengadaan barang**

Untuk melihat pengaruh penerapan lingkungan pengendalian terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang digunakan hasil perhitungan koefisien regresi. Dari hasil perhitungan analisis regresi yang dilakukan diperoleh koefisien regresi lingkungan pengendalian ( $X_1$ ) sebesar **0,270**. Koefisien regresi yang diperoleh tidak sama dengan 0 dan bertanda positif memperlihatkan bahwa penerapan lingkungan pengendalian berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang. Artinya semakin baik lingkungan pengendalian akan meningkatkan pencegahan *fraud* pengadaan barang.

#### **Pengaruh penerapan penilaian risiko terhadap pencegahan fraud pengadaan barang**

Untuk melihat pengaruh penerapan penilaian risiko terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang digunakan hasil perhitungan koefisien regresi. Dari hasil perhitungan analisis regresi yang dilakukan diperoleh koefisien regresi penilaian risiko ( $X_2$ ) sebesar **0,167**. Koefisien regresi yang diperoleh tidak sama dengan 0 dan bertanda positif memperlihatkan bahwa penerapan penilaian risiko berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang. Artinya semakin baik penilaian risiko akan meningkatkan pencegahan *fraud* pengadaan barang.

#### **Pengaruh penerapan kegiatan pengendalian terhadap pencegahan fraud pengadaan barang**

Untuk melihat pengaruh penerapan kegiatan pengendalian terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang digunakan hasil perhitungan koefisien regresi. Dari hasil perhitungan analisis regresi yang dilakukan diperoleh koefisien regresi kegiatan pengendalian ( $X_3$ ) sebesar **0,030**. Koefisien regresi yang diperoleh tidak sama dengan 0 dan bertanda positif memperlihatkan bahwa penerapan kegiatan pengendalian berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang. Artinya semakin baik kegiatan pengendalian akan meningkatkan pencegahan *fraud* pengadaan barang.

#### **Pengaruh penerapan informasi dan komunikasi terhadap pencegahan fraud pengadaan barang**

Untuk melihat pengaruh penerapan informasi dan komunikasi terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang digunakan hasil perhitungan koefisien regresi. Dari hasil perhitungan analisis regresi yang dilakukan diperoleh koefisien regresi informasi dan komunikasi ( $X_4$ ) sebesar **0,206**. Koefisien regresi yang diperoleh tidak sama dengan 0 dan bertanda positif memperlihatkan bahwa penerapan informasi dan komunikasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang. Artinya semakin baik informasi dan komunikasi akan meningkatkan pencegahan *fraud* pengadaan barang.

#### **Pengaruh penerapan pemantauan terhadap pencegahan fraud pengadaan barang**

Untuk melihat pengaruh penerapan pemantauan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang digunakan hasil perhitungan koefisien regresi. Dari hasil perhitungan analisis regresi yang dilakukan diperoleh koefisien regresi serta pemantauan ( $X_5$ ) sebesar **0,294**. Koefisien regresi yang diperoleh tidak sama dengan 0 dan bertanda positif memperlihatkan bahwa penerapan pemantauan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang. Artinya semakin baik serta pemantauan akan meningkatkan pencegahan *fraud* pengadaan barang.

## **Pengaruh penerapan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan terhadap kinerja keuangan**

### **Uji Simultan**

Untuk menguji hipotesis pertama mengenai pengaruh pada penerapan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel tidak bebas (Kinerja keuangan) dilihat dari nilai determinasi yang diperoleh. Hasil perhitungan koefisien determinasi dalam analisis regresi yang dilakukan diperoleh lebih dari 0 yaitu sebesar **0,621**. Koefisien determinasi yang diperoleh memperlihatkan adanya pengaruh positif pada lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dalam menjelaskan kinerja keuangan sebesar **62,1%**, sedangkan sisanya **37,9%** dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya saja variabel yang berkaitan dengan keandalan kualitas informasi laporan keuangan, sistem pengendalian manajemen, *moral literacy* atau eksternal audit.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Jeffrey (2008), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengendalian internal mempunyai kekuatan yang lebih pada suatu perusahaan, seperti perusahaan publik, swasta, dan organisasi non profit. Dengan pengendalian internal yang efektif, akan menghasilkan kinerja keuangan yang baik dan akan menaikkan *value* untuk melakukan merger ataupun akuisisi. Hal ini sejalan dengan Hardiman (1985), yang menjelaskan bahwa hasil evaluasi dari pengendalian internal akan digunakan oleh para praktisi untuk menyimpulkan suatu opini dalam laporan keuangan pada suatu entitas pemerintahan. Pertanggungjawaban suatu pengendalian internal terletak pada seorang manajer. Manajer akan diberikan penghargaan (*recognition*) karena telah melaksanakan pengendalian internal secara efektif khususnya pada pengendalian administrasi keuangan sehingga hasilnya akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahan tersebut.

Menurut Michelman (2008), lima komponen dari pengendalian internal yaitu *control environment*, *control activities*, *risk management*, *information and communication*, dan *monitoring* menawarkan pandangan yang lebih tentang bagaimana suatu perusahaan besar dapat menjalankan kegiatannya dengan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan kecil lainnya. Pengendalian internal atas laporan keuangan adalah sebuah batasan kerja yang menawarkan penjelasan yang jelas dari kelima komponen pengendalian internal sebaik bagaimana mereka mengaplikasikannya pada usaha kecil, profit dan non profit, karena fokus dari pengendalian internal adalah rasio keuangan.

### **Uji Parsial**

#### **Pengaruh penerapan lingkungan pengendalian terhadap kinerja keuangan**

Untuk melihat pengaruh penerapan lingkungan pengendalian terhadap kinerja keuangan digunakan hasil perhitungan koefisien regresi. Dari hasil perhitungan analisis regresi yang dilakukan diperoleh koefisien regresi lingkungan pengendalian ( $X_1$ ) sebesar **0,576**. Koefisien regresi yang diperoleh tidak sama dengan 0 dan bertanda positif memperlihatkan bahwa penerapan lingkungan pengendalian berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Artinya semakin baik lingkungan pengendalian akan meningkatkan kinerja keuangan.

#### **Pengaruh penerapan penilaian risiko terhadap kinerja keuangan**

Untuk melihat pengaruh penerapan penilaian risiko terhadap kinerja keuangan digunakan hasil perhitungan koefisien regresi. Dari hasil perhitungan analisis regresi yang dilakukan diperoleh koefisien regresi penilaian risiko ( $X_2$ ) sebesar **0,881**.

Koefisien regresi yang diperoleh tidak sama dengan 0 dan bertanda positif memperlihatkan bahwa penerapan penilaian risiko berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Artinya semakin baik penilaian risiko akan meningkatkan kinerja keuangan.

#### **Pengaruh penerapan kegiatan pengendalian terhadap kinerja keuangan**

Untuk melihat pengaruh penerapan kegiatan pengendalian terhadap kinerja keuangan digunakan hasil perhitungan koefisien regresi. Dari hasil perhitungan analisis regresi yang dilakukan diperoleh koefisien regresi kegiatan pengendalian ( $X_3$ ) sebesar **0,025**. Koefisien regresi yang diperoleh tidak sama dengan 0 dan bertanda positif memperlihatkan bahwa penerapan kegiatan pengendalian berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Artinya semakin baik kegiatan pengendalian akan meningkatkan kinerja keuangan.

#### **Pengaruh penerapan informasi dan komunikasi terhadap kinerja keuangan**

Untuk melihat pengaruh penerapan informasi dan komunikasi terhadap kinerja keuangan digunakan hasil perhitungan koefisien regresi. Dari hasil perhitungan analisis regresi yang dilakukan diperoleh koefisien regresi informasi dan komunikasi ( $X_4$ ) sebesar **0,087**. Koefisien regresi yang diperoleh tidak sama dengan 0 dan bertanda positif memperlihatkan bahwa penerapan informasi dan komunikasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Artinya semakin baik informasi dan komunikasi akan meningkatkan kinerja keuangan.

#### **Pengaruh penerapan pemantauan terhadap kinerja keuangan**

Untuk melihat pengaruh penerapan pemantauan terhadap kinerja keuangan digunakan hasil perhitungan koefisien regresi. Dari hasil perhitungan analisis regresi yang dilakukan diperoleh koefisien regresi serta pemantauan ( $X_5$ ) sebesar **0,096**. Koefisien regresi yang diperoleh tidak sama dengan 0 dan bertanda positif memperlihatkan bahwa penerapan pemantauan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Artinya semakin baik pemantauan akan meningkatkan kinerja keuangan.

#### **Pengaruh pencegahan *fraud* pengadaan barang terhadap kinerja keuangan**

Untuk melihat pengaruh pencegahan *fraud* pengadaan barang terhadap kinerja keuangan pada rumah sakit pemerintah dan swasta di kota Bandung digunakan hasil perhitungan koefisien regresi. Dari hasil perhitungan analisis regresi yang dilakukan diperoleh koefisien regresi pencegahan *fraud* pengadaan barang terhadap kinerja keuangan pada rumah sakit pemerintah dan swasta di kota Bandung ( $Y$ ) sebesar **1,275**. Koefisien regresi yang diperoleh tidak sama dengan 0 dan bertanda positif memperlihatkan bahwa pencegahan *fraud* pengadaan barang berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada rumah sakit pemerintah dan swasta di kota Bandung. Artinya semakin baik pencegahan *fraud* pengadaan barang akan meningkatkan kinerja keuangan pada rumah sakit pemerintah dan swasta di kota Bandung.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Albrecht (2007) bahwa terdapat hubungan pada pencegahan *fraud* dengan kinerja keuangan, karena dengan mencegah *fraud* maka dampaknya sangat baik terhadap kinerja keuangan. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Edi (2007) bahwa pencegahan *fraud* dapat terjadi jika ada pengawasan yang efektif pada proses manajemen terutama pada laporan keuangan dan mencegah *fraud* dalam pengelolaan keuangan negara lebih efektif dari pada melakukan upaya represif terhadap *fraud*, sehingga hasil penelitian ini menjelaskan bahwa salah satu cara yang ampuh untuk meningkatkan kinerja keuangan di lingkup pemerintahan dan swasta adalah pencegahan *fraud* pengadaan barang, yang mana semuanya harus didukung oleh sistem akuntansi yang dikelola dengan baik dan sumber daya manusia yang mempunyai moral yang tinggi.

Pada rumah sakit pemerintah yang mendapatkan dana dari APBN/APBD maka harus sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas untuk mencegah *fraud* yang terjadi di rumah sakit sehingga tanggung jawab terhadap keuangan negara dapat dilaksanakan dengan baik, begitu pula pada rumah sakit swasta yang dananya bersumber dari yayasan ataupun keuntungan dari rumah sakit tersebut, harus secara bersama-sama dan bertanggungjawab untuk menciptakan suasana lingkungan kerja yang positif sehingga pencegahan *fraud* dapat ditingkatkan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif pada penerapan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan baik secara parsial maupun simultan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang.
2. Terdapat pengaruh positif pada penerapan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja keuangan.
3. Terdapat pengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengadaan barang terhadap kinerja keuangan.

### Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka dalam penelitian ini ada beberapa saran yang dapat dikemukakan, yakni :

1. Dalam variabel kegiatan pengendalian memiliki skor/nilai yang rendah. Oleh karena itu disarankan kepada rumah sakit pemerintah dan swasta untuk memaksimalkan kegiatan pengendalian karena mempunyai peranan yang penting dalam mencegah *fraud* pengadaan barang.
2. Untuk variabel informasi dan komunikasi, memiliki skor/nilai yang rendah karena pemberdayaan SDM belum maksimal dilaksanakan dan juga adanya ketidaksesuaian jurusan/pendidikan pada jabatan yang dipegang. Oleh karena itu disarankan kepada rumah sakit pemerintah dan swasta agar pemberdayaan SDM dilakukan dengan baik dan tepat sasaran.
3. Kepada seluruh komponen yang ada di rumah sakit dapat memahami tugas dan wewenang masing-masing, sehingga tugas dan tanggungjawabnya dapat dijalankan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, seperti merasa dimata-matai dalam melak-sanakan tugas dan tanggungjawabnya.

## REFERENSI

- Ahmad Syakhroza, 2000. **Bagaimana Mengukur Kinerja Terciptanya "Good Corporate Governance"**, Usahawan No.10 TH XXIX, Oktober.
- Albercht, W.Steve,Chad O.Albercht, 2005. **Fraud Examination & Prevention**. Thomson South-Western
- Albrecht, Chad, Conan Albrecht, Simon Dolan, 2007. **Financial Fraud: the how and why**, *European Business Forum; Summer*;29;pg. 34
- Albrecht, Chad, Conan Albrecht, 2008. **The Nature of Financial Statement Fraud**, *Internal Auditing*; Jul/Aug; 23, 4; pg. 22
- Amrizal, 2004. **Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor**. Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD Deputi Bidang Investigasi

- Association Certified Fraud Examinations, 2006. **Fraud Examination Manual**, Third Edition.
- Arens, Alvin A. Randal J. Elder, Mark S. Beasley, 2004. **Auditing And Assurance Service An Integrated Approach**. New Jersey: Prentice Hall International.
- Barker, C. Pistrang, N. and Elliott, R. , 2002. **Research Methods in Clinical Psychology : An Introduction for Students and Practitioners**, 2<sup>nd</sup> Edition, John Wiley & Sons, Ltd., England
- Boynton William c., Raymon N. Jhonson, Walter G. &, Kell, 2001. **Modern Auditing**. Seven Edition. USA Richard D. Irwin Inc.
- Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO), 1992. Adendum 1994. **Internal Control Integrated Framework**. AICPA Publication
- Eddy Mulyadi Soepardi, 2007, **Upaya Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Negara**, EBAR, Vol II, No 1, Jan-April
- Gusnardi, 2008. **Pengaruh Peran Komite Audit, Internal Kontrol dan Internal Audit dalam pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pencegahan Fraud**, Disertasi, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Gul, Ferdinand A, Yew Ming Chia, 1995, **The Effect of Management Accounting Systems, Perceived Environmental Uncertainty and Decentralization on Managerial Performance: A Test of Three-Way Interaction**, *Accounting Organization and Society*, Vol 19, No 4-5, p 413-426
- Hardiman, Patrick. Arlene Lurie, Frank Dubas; David Schoen, 1985, **Internal control and financial integrity in government units**, *The CPA Journal (pre-1986)*; Apr; 55, 000004; pg. 46
- Hurley, A. Diarmuid, 2007. **Sarbanes Oxley Act Section 404: Effective Internal Controls or Overriding Internal Control ?**, *Forensic Examiner; Summer; 16,2 Proquest Psychology Journals pg. 19*
- Hall, James A, 2001, **Sistem Informasi Akuntansi**, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta
- Jensen, Michael, William Meckling, 1976. **"Theory of Firms: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure"**, *Journal of Financial Economic*. October Vol. 3. pp 305-360
- Johar Arifin, 2006. **Manajemen Rumah Sakit Modern Berbasis Komputer**, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta
- Jeffrey, Chris, 2008. **Internal Control at Private Companies and Nonprofits**, *The CPA Journal*, Sep, 78,9 Pg. 52
- Konrath, Lawsey, F, 2002. **Auditing Concept and Application, A risk Analysis Approach**, 5<sup>th</sup> Edition. West Publishing Company
- Moller, R and H. Witt, 1999. **Brink's Modern Internal Auditing**. 5<sup>th</sup> Edition. John Wiley and Sons, Inc New York
- Michelman, E. Jeffrey, Bobby E Waldrup, 2008. **Improving Internal Control Over Financial Reporting**, *The CPA Journal*; April; 78, 4; pg 30
- Paton W. A., 1922. **Accounting Theory, With Special Reference to the Corporate Enterprise**, The Ronald Press, New York
- Pope, Jeremy, 2003, **Strategi Memerantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional**, Edisi II, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Ruslan, 2009. **Internal Control Berbasis COSO**, [www.mediareformasi.com](http://www.mediareformasi.com), 23 Mei
- Singleton, Tommie, 2002. **Stop fraud cold with powerful internal controls** *The Journal of Corporate Accounting & Finance*; May/June; 13, 4; pg. 29
- Sekaran, Uma, 2003. **Research Method for Business.. A Skill Building Approach**. Four Edition. New York. John Wiley & Sons Inc.
- Sugiono, 2005. **Metode Penelitian Bisnis**. Alfabeta. Bandung
- Tuanakotta, Theodorus M. 2006. **Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif**. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI), Jakarta.